



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia
— EST. 1849 —

MENINGGALKAN BENCANA, HIDUP BARU DI RUSUNAWA MARUNDA:

**PENELITIAN MENGENAI
'FORCED MIGRATION' AKIBAT BANJIR JAKARTA UTARA SEBAGAI
PENDORONG KEBIJAKAN RELOKASI KAWASAN KUMUH JAKARTA**

UJIAN AKHIR SEMESTER

MATA KULIAH DEMOGRAFI SOSIAL

DOSEN PENGAMPU:

DR. Imam B. Prasodjo dan Lidya Triana, M.Si

IRINA RAFLIANA

NPM: 1306426791

PROGRAM PASCASARJANA JENJANG MAGISTER

DEPARTEMEN SOSIOLOGI – FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS INDONESIA

SEMESTER GENAP 2013/2014

Jakarta, 16 Juni 2014

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	3
2. LATAR BELAKANG	3
3. PERMASALAHAN	6
4. TUJUAN PENELITIAN	7
5. METODOLOGI	8
6. TINJAUAN PUSTAKA	9
7. PEMBAHASAN	14
8. SIMPULAN DAN REKOMENDASI	24
9. PENUTUP	25
10. DAFTAR PUSTAKA	26
11. DAFTAR GAMBAR	
Gambar Peta DKI Jakarta	4
12. DAFTAR FOTO	
Foto 1	4
Foto 2	15
Foto 3	17
Foto 4	17
Foto 5	19
Foto 6	25
13. DAFTAR GRAFIK	
Grafik 1: Alasan pindah ke Rusun	16
Grafik 2: Fasilitas di tempat tinggal lama	19
Grafik 3: Fasilitas di Rusun Marunda	20
Grafik 4: Kesan setelah tinggal di Rusun	22
Grafik 5: Peluang ekonomi di tempat tinggal lama	22
Grafik 6: Peluang ekonomi di tempat tinggal baru	23
14. LAMPIRAN	
a. Transkrip Wawancara	27

MENINGGALKAN BENCANA, HIDUP BARU DI RUSUN MARUNDA:

PENELITIAN MENGENAI 'FORCED MIGRATION' AKIBAT BANJIR JAKARTA UTARA SEBAGAI PENDORONG KEBIJAKAN RELOKASI KAWASAN KUMUH JAKARTA

1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk Jakarta, terutama penduduk miskin yang mengisi kantung-kantung hunian kumuh di wilayah rawan banjir menambah permasalahan. Pemerintah daerah sudah menggagas pemindahan penduduk untuk mengatasi permasalahan pemukiman terutama pemukiman kumuh, bukan hanya karena dampak banjir, namun karena menghambat pembangunan. Salah satu solusi yang dianggap baik bagi pembangunan Jakarta adalah membangun hunian vertikal. Namun hal ini belum dapat diterima oleh budaya masyarakat yang masih memilih hunian yang dekat dengan lahan. Lagi pula, banjir sudah demikian melebur menjadi bagian dari budaya masyarakat miskin kota. Kesepakatan buka tutup pintu air misalnya, sebelum diserahkan pada pemerintah daerah, diputuskan sendiri oleh masyarakat sehingga tak jarang pula memicu konflik¹. Dan pemindahan penduduk justru merupakan masalah bagi warga miskin yang tidak memiliki banyak pilihan.

Pemindahan penduduk ke Rusunawa Marunda tidak selancar yang diharapkan. Dalam momentum banjir tahun 2013, nampaknya *forced migration* menjadi celah masuk yang strategis untuk memindahkan masyarakat ke pemukiman vertikal yang sudah disiapkan sebelumnya, dan mengatasi permasalahan warga miskin terdampak banjir di kawasan kumuh menggunakan instrumen-instrumen tata kelola pemerintahan baik subsidi, modal kerja dan pemenuhan fasilitas umum. Sarana prasarana pengendalian banjir dianggap belum berfungsi maksimal, dan instrumen ini belum dapat dijadikan instrumen untuk mengatasi masalah masyarakat miskin terdampak banjir agar mampu memulihkannya pada kondisi semula, atau lebih lanjut

¹ Restu Gunawan, *Di Kala Air Tidak lagi Menjadi Sahabat: Banjir di Jakarta 1930-1970*, dalam *Indonesia Across Orders: Arus Bawah Sejarah Bangsa (1930-1960)*, e. Taufik Abdullah, LIPI Press 2011

lagi memenuhi harapan dari pemerintah atas masalah sosial kependudukan di wilayah urban seperti Jakarta.

Tahun 2013 lalu Jakarta kembali mengalami banjir tahunan. Kecamatan Penjaringan tidak absen dari dampak banjir yang justru semakin parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Laporan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mencatat bahwa kejadian bencana bulan Januari tersebut, adalah karena gagal fungsi dari sarana prasarana pengendalian banjir². Penyebab lainnya adalah meluapnya waduk Pluit, Kali Angke Hilir dan hujan menerus. Waduk Pluit sendiri tidak jebol, namun banjir di Pluit adalah akibat dari jebolnya tanggul Banjir Kanal Barat di Laturharhary yang terjadi hari Kamis 17 Januari 2013. Sementara pompa Cideng yang berfungsi sebagai prasarana pengendali banjir tidak berfungsi. Dengan tidak berfungsinya pompa banjir dan jebolnya waduk di Laturharhary, banjir meluas hingga ke wilayah Pluit³.

Momentum banjir 17 Januari 2013 sendiri merupakan pemantik dari kondisi geologis Jakarta Utara yang semakin tidak menguntungkan. Kota Jakarta utara dalam wilayah administratif Daerah Khusus Ibukota (DKI) mendominasi garis pantai menghadap ke Laut Jawa. Sebanyak tiga belas sungai besar yang melewati Jakarta bermuara di teluk Jakarta, yang masuk dalam wilayah administratif Jakarta utara ini. Sedangkan 40% wilayah topografi DKI Jakarta terutama di wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut. Penurunan tanah yang terjadi di Jakarta Utara mencapai 10 centimeter per tahunnya, dan memperparah kondisi geografis wilayah ini. Nilai penurunan tanah atau *land subsidence* justru terjadi paling tinggi di wilayah Muara Baru, Kecamatan Penjaringan⁴. Tidak heran, pada tahun 2013 lalu, wilayah ini mengalami dampak banjir yang sangat serius, bahkan lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa kisah menarik ditulis dalam blogspot Thomas Kurniawan yang bertempat tinggal di kawasan Pluit Jakarta⁵ yang masuk dalam kecamatan Penjaringan.

² <http://news.detik.com/read/2013/01/18/133633/2146260/10/bnpb-8-atau-41-km-persegi-daerah-jakarta-tergenang-banjir-kemarin?nd771104bcj> diunduh tanggal 15 Juni 2014

³ <http://AntaraneWS.com> Minggu, 20 Januari 2013

⁴ RPJMD DKI Jakarta 2012-2019

⁵ <http://tom-kuu.blogspot.com/2013/01/di-balik-kisah-banjir-pluit-januari-2013.html>, diunduh tanggal 14 Juni 2014

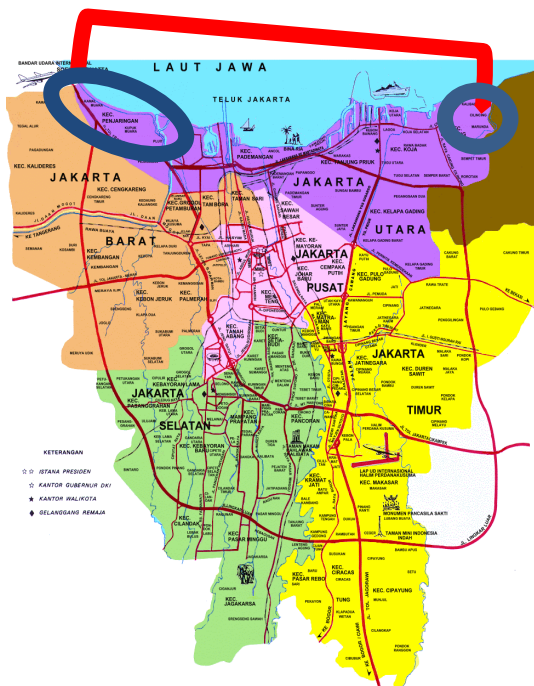
Thomas mendokumentasikan kejadian banjir Jakarta tahun 2013 dalam bentuk tulisan populer *a la* blogger. Diantara informasi yang didokumentasikannya itu, Thomas menulis bahwa banjir di Pluit sangat jarang terjadi. Kejadian tahun 2013 lalu merupakan kejadian bencana yang tidak diduga. Thomas adalah diantara segelintir warga Ibukota Jakarta yang memiliki pilihan untuk bertahan dan tinggal di sebuah hotel cukup mewah, setidaknya Rp. 700,000 semalam selama beberapa hari. Dengan empat orang rekan-rekannya, Thomas juga memiliki pilihan untuk menyewa perahu berkisar Rp. 500.000, untuk membawa mereka keluar dari kawasan Pluit dan menggunakan modal sosial mereka untuk tinggal di wilayah lain di Jakarta, dan meninggalkan banjir sementara yang menggenangi Pluit selama berhari-hari. Pemulihan sarana prasarana banjir nampaknya akan sekedar menguntungkan kelompok-kelompok masyarakat kelas menengah atas, yang digambarkan dari pengalaman Thomas dalam blognya.

Namun sebagian besar warga Kecamatan Penjaringan baik itu warga Muara Baru, Kapuk Muara, Rawa Bebek dan sekitarnya tidak memiliki pilihan yang sama. Ketinggian air mencapai hingga 2 meter di pemukiman-pemukiman kumuh yang disewa atau dibangun di atas tanah tanpa izin resmi. Kondisi sosial dan ekonomi yang melatari sebagian warga miskin Jakarta di kawasan Jakarta Utara justru meningkatkan kerentanan terhadap berbagai kejadian yang mengganggu kehidupan sosialnya. Pilihan yang tersedia adalah berpindah-pindah pengungsian, untuk kemudian kembali lagi ke rumah tinggal atau pemukiman sebelumnya, yang kumuh, ilegal maupun rawan banjir, namun dilain pihak kegiatan ekonomi pada kenyataannya menjanjikan kelanjutan hidupnya hari-demi-hari. Hingga suatu saat di awal tahun 2013, pemerintah DKI Jakarta memberikan pilihan lain, yaitu pindah secara permanen ke Kecamatan lain di Jakarta Utara, yaitu ke Kecamatan Cilincing. Di kecamatan ini telah dibangun sebuah fasilitas warga miskin Jakarta Utara yang dibangun untuk menampung penduduk yang tergusur akibat kebijakan pemerintah⁶. Sedangkan para pemukim lain di lokasi awal kawasan kumuh mengalami pengusuran akibat rencana pembangunan termasuk normalisasi Waduk Pluit. Dalam waktu singkat pemerintah DKI Jakarta mencatat, sebanyak 467 Kepala

⁶ Aninda Ratih Kusumaningrum, thesis Analisis Kebijakan Rumah Susun Sewa dengan Studi Kasus Rumah Susun Marunda, UI 2012

Keluarga asal Muara Baru yang terdampak banjir di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara telah bersedia pindah untuk menghuni Rumah Susun Marunda⁷. Sebanyak 500 unit di Rusun Marunda disiapkan untuk ditempati, sedangkan jika tidak penuh maka rusun lain seperti di Pulo Gebang atau Pinus Elok juga disiapkan. Bagi warga korban banjir, pemerintah menyiapkan biaya sewa yang lebih murah.

1.2. PERMASALAHAN



Gambar 1: Peta Jakarta. Perpindahan warga Kecamatan Penjaringan ke Administratif Marunda, Kecamatan Cilincing berjarak sekitar 20km. Sumber: Bappeda DKI Jakarta, dimodifikasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta (RPJMD DKI Jakarta) secara khusus memprioritaskan masalah banjir Jakarta. Hal ini tidak terlepas dari kepentingan capaian-capaian pembangunannya. Isu banjir juga tidak lepas dari isu perumahan, pemukiman serta kemiskinan kota yang menjadi perhatian serius berikutnya.

Masalah pelik dari kejadian bencana banjir, diantaranya adalah transisi dari masyarakat terdampak, dari pengungsi menjadi migrasi. Masalah banjir menahun di Jakarta tidak semata-mata terjadi akhir-akhir ini. Banjir telah menjadi keseharian sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu, dan melebur dalam budaya pluralitas penduduknya.

Masyarakat terdampak banjir kerap enggan pindah dan menerima setiap kejadian bencana sebagai bagian dari keseharian. Maka menjadi penting untuk melihat bagaimana pada saat ini, populasi, kemiskinan dan tata kelola pemerintahan menemukan caranya untuk mengatasi masalah pelik banjir dan pembangunan di kota Jakarta. Masyarakat di bantaran kali maupun wilayah-wilayah rawan banjir di

⁷<http://www.jakarta.go.id/v2/news/2013/01/467-kk-asal-muara-baru-huni-rusun-marunda#.U5wM7pSSzko>

Jakarta pada umumnya melakukan tindakan mengungsi setiap terjadi banjir yang cukup parah, namun tidak sampai migrasi, atau pindah dari tempat tinggal asal ke tempat tinggal baru untuk mendapatkan tempat tinggal bebas banjir. Hal ini terkait berbagai hal, termasuk di dalamnya akses terhadap perekonomian yang dianggap lebih baik ketika mereka tinggal di kawasan banjir, sehingga konsekuensi tinggal bersama banjir seolah menjadi satu-satunya pilihan. Status sebagai pengungsi adalah lazim, dan kemudian para pengungsi ini akan kembali lagi pada rumah tinggal mereka di kawasan yang terdampak banjir.

Peristiwa banjir Pluit bulan Januari 2013 menimbulkan perdebatan menarik. Pemerintahan provinsi yang baru mendesakkan kebijakan yang memungkinkan pilihan masyarakat, terutama masyarakat miskin tidak lagi terbatas dan justru menyentuh 'solusi' dari permasalahan berikutnya, yaitu terkait isu kemiskinan kota serta pemukiman. Masyarakat terdampak yang ditemui di pengungsian oleh pejabat pemerintah termasuk langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, diberikan alternatif yaitu tinggal dan menetap di fasilitas rumah susun. Status dari para pemukim di Rusun Marunda bukan lagi sebagai pengungsi, melainkan sebagai *permanent resident*, atau penghuni tetap yang membayar biaya sewa. Artinya, migrasi terjadi dalam hal ini. Namun demikian, apakah masyarakat yang pindah ke kawasan Rumah Susun Marunda adalah disebabkan *forced migration* atau *voluntary migration*? Jika memang disimpulkan sebagai *forced migration* atau *voluntary migration*, faktor apa yang melatarinya? Lalu apakah kepindahan secara permanen ini menjawab persoalan-persoalan kemiskinan, pemukiman dan pembangunan di DKI Jakarta?

2. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk menjelajahi diskursus terkait dengan bencana dalam perspektif demografis atau kependudukan. Hal ini menarik, karena memberikan peluang keluar dari diskursus lazimnya dimana bencana dianalisis dari permasalahan sosial sebelum, saat dan setelah bencana terjadi. Jika dilihat dari perspektif demografis, maka cara pandang terhadap masalah bencana banjir menjadi lebih luas, diantaranya misalnya, bagaimana bencana dan kependudukan sangat berkait erat serta penting dalam menganalisis kepentingan-kepentingan

pembangunan. Dimensi sebelum, sesaat dan sesudah bencana menjadi terlalu sempit untuk digunakan dalam analisis ini. Dengan pembahasan terkait tersebut, maka diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan kebaruan ranah sosiologi bencana.

3. METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaitkan tiga faktor penting dalam membahas wacana bencana dalam perspektif demografis, yaitu terkait dengan penduduk, kemiskinan dan tata kelola pemerintahan dengan metode *mixed method*. Dengan pembahasan terkait tiga faktor penting tersebut, maka tentu akan bermanfaat dan menyumbang kebaruan juga dalam ranah sosiologi bencana.

Pembahasan mengenai penduduk dan kemiskinan akan digali melalui analisis komparatif sederhana antara kondisi masyarakat sebelum dan sesudah pindah ke rumah susun Marunda. Untuk dapat melakukan pembahasan tersebut maka akan dilakukan metode kuantitatif dengan memanfaatkan informasi dari kuesioner yang telah disiapkan oleh kelas perkuliahan Demografi Sosial 2014.

Sedangkan bagaimana tata kelola pemerintahan berkontribusi dalam menjelajahi ruang-ruang solutif atas masalah banjir Jakarta ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan beberapa responden di Rumah Susun Marunda. Selain itu dilakukan juga kajian atas beberapa literatur terkait termasuk kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melalui Rencana Pembangunan jangka Mengengah Daerah serta dokumen, referensi dan regulasi terkait lainnya.

4. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini ditujukan untuk menggunakan beberapa referensi penting sebagai rujukan pembahasan penelitian. Tinjauan pustaka meliputi penjelajahan dari definisi migrasi dan migrasi terpaksa atau *forced migration*. Penelitian terkait dengan *forced migration* juga dihadirkan untuk mendapatkan kerangka analisis yang lebih baik. Selain itu, tinjauan pustaka ini juga membahas secara singkat kebijakan rumah susun beserta beberapa literatur terkait.

4.1. Migrasi terpaksa (*Forced Migration*)

Pertanyaan mengenai migrasi selalu menjadi pertanyaan yang penting. Hal ini juga diingatkan oleh John Weeks (2008). Meletakkan definisi migrasi ditentukan oleh beberapa hal, yaitu bahwa migrasi merupakan aktivitas (berupa perubahan alamat) yang dilakukan oleh orang-orang (para migran) melalui berbagai kondisi legal dan sosiopolitik. Definisi migrasi adalah perubahan alamat secara permanen. Dalam hal ini, yang paling penting dalam definisi migrasi adalah definisi spasial atau ruangnya, sehingga tidak dapat dikatakan migrasi, jika tidak berpindah 'ruang'. Namun, meskipun perpindahan ruang terjadi, belum tentu juga dikatakan migrasi karena kasusnya bisa jadi merupakan mobilitas seperti halnya yang terjadi dengan perpindahan penduduk setiap hari dari Depok untuk bekerja di Jakarta di pagi hari, lalu kembali lagi ke Depok di sore atau malam hari.

Setidaknya pertanyaan penting mengenai migrasi menyangkut dua hal. Pertama, kapan sebuah perpindahan dapat dikatakan 'migrasi' atau bukan migrasi. Sejauh mana seseorang harus berpindah, sehingga dapat dikatakan migrasi. Maka Weeks juga berhati-hati dalam menganalisis ini untuk kemudian memberikan rambu-rambu bahwa perpindahan terjadi melewati batas administrasi tertentu. Sehingga pindah di dalam suatu Kabupaten pun dapat dikatakan sebagai migrasi, jika perpindahan itu menyebabkan perubahan alamat secara permanen. Perpindahan bisa terjadi, dan dapat terjadi dalam waktu lama dengan status sebagai *temporary resident* atau penduduk sementara, seperti halnya terjadi dalam kasus pengungsian, namun belum dikatakan migrasi jika pada saat mengungsi tersebut, tidak terjadi perubahan alamat secara permanen.

Lalu kedua, pertanyaan penting berikutnya yang diajukan oleh Weeks adalah mengenai kata 'permanen'. Apa batasan permanen? Ini perlu dibahas dengan hati-hati karena pada dasarnya masyarakat bergerak secara dinamis dengan berbagai latar dan alasan sehingga tidak mudah untuk mengukur seberapa pasti ia akan tinggal menetap. Migrasi juga melibatkan lebih dari satu individu, bisa jadi satu keluarga, satu kampung atau sebuah wilayah administrasi tertentu yang bersama-sama pindah. Kosongnya sebuah wilayah karena perpindahan masyarakatnya, tidak menandakan berakhirnya masyarakat tersebut, melainkan hanya terjadi proses relokasi semata.

Migrasi dapat dibagi menjadi migrasi bebas atau sukarela, yang artinya penduduk atau individu dapat bebas memilih untuk bermigrasi atau tidak secara sukarela. Migrasi ini sering terjadi dengan alasan ekonomi, sosial maupun budaya. Sedangkan migrasi terpaksa, artinya orang atau penduduk dipaksa pindah karena kejadian bencana alam, konflik atau perselisihan sipil belatar etnis maupun agama yang memaksanya untuk pindah mencari keamanan dan perlindungan di tempat lain, di luar maupun di negaranya sendiri⁸.

John Weeks melanjutkan pembahasannya terkait dengan migrasi terpaksa. Masyarakat mengalami 'keterpaksaan' untuk berpindah baik di dalam kota, luar kota bahkan keluar dari negaranya karena berbagai hal, misalnya karena proses pembangunan, perang maupun bencana alam. Faktor-faktor politis yang menjadi penyebab pindahnya masyarakat dan melakukan migrasi biasanya 'dipaksakan' oleh pemerintah, misalnya untuk pembangunan waduk dan lainnya. Sementara dalam kasus di Jawa yang padat penduduk, pemerintah Indonesia di masa Orde Baru menerapkan kebijakan transmigrasi ke wilayah-wilayah lain yang masih jarang penduduknya. Dalam kasus ini, biasanya pemerintah melakukan persiapan-persiapan termasuk pemenuhan kebutuhannya, dan masyarakat pun mengantisipasi kepindahan ini. Setidaknya diharapkan bahwa masyarakat yang ikut di dalam programnya akan dapat mencapai taraf hidup lebih baik meskipun ada beberapa dampak yang tidak diharapkan dari proses pemindahan tersebut.

⁸ Konsorsium Fakultas Ilmu Sosial, Depdikbud dan BKKBN, 1985. *Studi Kependudukan*

4.2. Perumahan bagi masyarakat miskin

Derasnya perpindahan penduduk yang pindah baik sementara maupun permanen dari berbagai wilayah desa atau sub urban ke kota-kota besar termasuk Jakarta, tidak diimbangi oleh investasi pemerintah pada fasilitas publik termasuk perumahan. Pembangunan kawasan pemukiman menjadi tidak berimbang. Pembangunan yang kemudian direncanakan kembali memerlukan penggusuran, sebagaimana telah dipraktikkan sejak tahun 1900an setidaknya di Batavia. Padahal saat ini, jumlah warga miskin Jakarta cukup signifikan, misalnya di tahun 2008 saja jumlahnya sudah mencapai angka 85.200 jiwa⁹. Warga miskin tidak memiliki kemampuan membeli lahan menjatuhkan pilihan pada sewa lahan atau bangunan. Kerap pemukiman yang disewa berdiri di lahan-lahan rawan bencana, terutama banjir serta kebakaran. Warga miskin ini didefinisikan sebagai warga yang memiliki penghasilan Rp.3.500.000, per bulan¹⁰.

Undang-undang No. 16 tahun 1985 hadir untuk mengatur tata laksana pengembangan dan pemanfaatan rumah susun, termasuk bagi masyarakat miskin. Tipe rumah susun juga dibagi menjadi Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) dan Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik). Penelitian Kusumaningrum lebih lanjut menemukan bahwa rusunawa lebih efisien sebagai investasi fasilitas publik, ketimbang rusunami, dengan pertimbangan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi dan daya beli masyarakat miskin yang masih cenderung rendah. Rusun Marunda terutama yang diteliti menerapkan sistem sewa, yaitu para penghuni membayar sejumlah biaya yang ditentukan oleh pengelola.

Edward Goetz dalam Kusumaningrum (2012) juga menuliskan bahwa subsidi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyiapkan fasilitas rumah susun sederhana sewa, adalah untuk mendekonsentrasi kemiskinan. Namun nampaknya Goetz dengan perspektif ekonominya memilih untuk meyakini bahwa upaya dekonsentrasi kemiskinan ini pada akhirnya akan membawa pemerataan akses terhadap sumberdaya dan ekonomi.

⁹ Aninda Ratih Kusumaningrum, thesis Analisis Kebijakan Rumah Susun Sewa dengan Studi Kasus Rumah Susun Marunda, UI 2012

¹⁰ Ibid.

4.3. Sejarah Kebijakan Penggusuran dari Pemerintah Hindia Belanda, hingga Pemerintah Saat Ini

Pemindahan penduduk untuk kepentingan tata kota serta pemukiman sudah menjadi problem sejak zaman Belanda. Sejak Gementee Batavia dibentuk, upaya mengatur ulang tata kota dan pemukiman dilakukan setidaknya mulai tahun 1905. Untuk membangun sarana prasarana air ledeng maka dibangun riolering bawah tanah yang memerlukan pemindahan beberapa kampung. *Forced migration* terjadi dari Menteng ke Karet bagi sejumlah warga kampung asli, termasuk misalnya milik Haji Naing Togok. Sementara tanah mereka disewa dengan harga tinggi agar tidak meminta kompensasi apapun untuk rumah dan pohon yang terdampak pembangunan. Karena terjadi konflik harga sewa yang dituntut warga, Serikat Islam kemudian mengadakan pembelaan agar penggusuran juga diikuti dengan perbaikan kampung dan kesehatan¹¹.

Jika kita memandang balik terhadap kebijakan penggusuran yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda, ada persamaan yang melekat pada kebijakan pemerintah DKI saat ini. Meskipun penggusuran yang dilakukan di kawasan Menteng oleh Gemeente Batavia tahun 1905 tidak menggunakan momentum banjir, namun pemerintah Hindia Belanda melakukan negosiasi sewa tanah, serta perbaikan kampung tempat tinggal baru termasuk fasilitas kesehatan agar tidak ada tuntutan yang muncul di kemudian hari. Namun pada saat terjadi peralihan pendudukan Jepang, terjadi kebijakan yang berbeda, dan penduduk dibairkan menggarap lahan-lahan kosong karena Jepang memerlukan pengerahan tenaga dan penyediaan makanan. Akibatnya terjadi kekacauan pemilikan lahan. Sementara kejadian banjir terus terjadi baik di tahun 1932, 1950 dan 1960, dilanjutkan dengan banjir-banjir 10 tahunan berikutnya, yang hingga saat ini periode banjir menjadi lebih sering. Banjir besar kurang dari 10 tahun sudah terjadi di Jakarta.

Pemindahan penduduk atau *forced migration* terjadi pada akhir tahun 1950an pada saat pemerintah Orde lama melakukan pembangunan Gelora Senayan. Pemindahan dilakukan terhadap 60.000 warga ke daerah Tebet, Slipi dan Ciledug.

¹¹ Restu Gunawan, Di Kala Air Tidak lagi Menjadi Sahabat: Banjir di Jakarta 1930-1970, dalam Indonesia Across Orders, Ed. Taufik Abdullah, LIPI Press 2011. Kisah penggusuran ini diambil Gunawan dari buku Adolf Heuken, Menteng Kota Taman Pertama di Indonesia, dicetak Yayasan Obor 2001

Sayangnya pemerintah saat itu tidak melakukan pengelolaan yang baik terkait biaya ganti rugi, yang diakui diterima warga sejumlah hanya Rp.500 rupiah, jumlah yang terlampau sedikit pada saat itu. Untuk mengantisipasi warga menempati bangunan tanpa izin di bantaran sungai, Gubernur DKI saat itu menetapkan penguasaan lahan sebagai tambahan pembangunan by pass Tanjung Priok – Cililitan.

Pilihan menggusur warga, dalam hal ini *forced migration* dilakukan dengan hukum yang cenderung berat sebelah, dan represif dengan masyarakat miskin yang menanggung konsekuensi dari kepindahan tanpa imbalan layak yang disiapkan oleh Pemerintah. Sementara mereka juga semakin teralienasi dari akses pemanfaatan hasil dari penataan ulang kota yang seolah hanya dapat diakses masyarakat kelas ekonomi yang lebih baik.

5. PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda

Rusun Marunda terletak di Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Rusun ini terletak di kawasan industri strategis, berjarak sekitar 20 kilometer dari Kelurahan Penjaringan yaitu wilayah tinggal semula para korban banjir yang kini menetap di Rusun. Salah satu dari perusahaan yang cukup besar dan diminta pemerintah DKI Jakarta untuk melibatkan warga Rusun adalah PT KBN (Kawasan Berikat Nusantara). Fasilitas Marunda Center sebagai kawasan pergudangan juga dibangun di wilayah ini. Selain itu, terdapat sekolah tinggi ilmu pelayaran, STIP. Kawasan Rusun Marunda juga di tepi laut, sehingga memungkinkan bagi warganya membuka usaha sampingan tambak.

Rusun ini merupakan program pemerintah DKI yaitu terkait dengan rencana 1000 Tower. Saat ini, sudah terdapat Cluster A, Cluster B, dan Cluster C. Di Cluster A hingga tahun 2012 sudah dihuni oleh 500 KK. Sedangkan di Cluster C pada umumnya dihuni satu tahun setengah ini, setelah kejadian bencana banjir 2013 lalu.



Foto 1: Daeng, ketua rombongan 37 KK pertama yang pindah ke Tower 8

“Dulu nggak kayak begini. Rawa ini. Ini sudah dibangun tapi masih rawa tidak bersih kayak gini. Baru ini kami di urug. Saya datang kesini. Waktu disana banyak nyamuk, disini lebih banyak lagi nyamuk disini kalau kita pikir-pikir waktu pertama. Setelah kita udah disini, mungkin dukungan-dukungan banyak benar-benar diperbaiki. Diurug semua. Sampai sekarang di rumah tidak ada keramik, tapi kita bersyukurlah. Pindah pertama kali saya ini sama 37 KK, gelombang pertama, blok 8 ini pertama ini, dibawa oleh Ahok. Blok 8 ini pertama kali pindah dari Pluit, tapi karena korban banjir. Memang ada yang pertama pindah di Blok 1 di depan, tapi bukan korban banjir. Blok 8, blok 7, blok 9, blok 11, blok 10, blok 2, blok 3 sebagian. Blok 5 sebagian umum, sebagian korban banjir. Berikut juga blok 6, memang korban banjir. Orang lain baru pada mau. Kalau yang pertama, masih mikir-mikir. Belakangan ini baru menyesal, sampai ada yang mau beli tapi disini tidak diperjual belikan. Karena memang kita aturannya begitu.”

5.2. Banjir Penjaringan Mengakibatkan *Forced Migration*?

Beberapa kondisi yang ditemukan terkait dengan fenomena kependudukan dan banjir Jakarta ini membantu penulis untuk memutuskan bahwa perpindahan masyarakat dari Muara Baru ke Marunda dalam konteks bencana banjir Jakarta adalah merupakan migrasi, yaitu migrasi terpaksa atau *forced migration*. Hal ini merujuk pada referensi yang digunakan yaitu Weeks (2008) yang menetapkan *rule of thumbs* dari pendefinisian migrasi, yaitu terjadinya perpindahan penduduk melewati batas administrasi, dan perpindahan tersebut, meskipun terjadi di dalam kota tertentu, masih dapat disebut sebagai migrasi. Ditambahkan pula oleh John Weeks bahwa pendefinisian migrasi juga terkait dengan perpindahan penduduk dalam kondisi-kondisi yang legal atau sah. Sementara perpindahan penduduk dari Muara Baru dan kawasan Pluit ke Rumah Susun Marunda adalah kondisi yang didorong oleh kebijakan pemerintah DKI Jakarta, sehingga dapat diasumsikan sah.

Masyarakat kawasan Penjaringan yang terdampak banjir, terutama warga miskin yang menyewa lahan tempat tinggal tidak serta merta pindah ke Rusun Marunda. Mereka berpindah-pindah tempat pengungsian beberapa kali. Pada saat itu, sebagian fasilitas Rusun Marunda sudah diisi oleh warga yang bersedia menempatnya namun tidak terkena dampak banjir 2013. Masyarakat tidak serta-merta pula menerima tawaran pindah ke Rusun Marunda, karena berbagai pertimbangan. Pengambilan keputusan untuk pindah bermacam-macam, namun pada umumnya diputuskan oleh kepala keluarga. Dorongan kebijakan pemerintah yang disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta ini dikonfirmasi oleh para penghuni rumah susun yang diwawancarai. Salah satunya adalah Pardiana Lestari, penghuni Rusun yang pindah karena terdampak banjir.

“Tempat disini lebih enak. Kalau di sono mah kena banjir parah mbak. Sampai plafon rumah. Terus ngungsi di Pemeta (Permata?). Terus pak Ahok datang, nawarin mau Rusun nggak di Marunda? Kan banyak yang nggak mau. Saya mah nggak kompromi sama keluarga, sama suami aja, ya udah yang enak nya aja. Pas dilihat tempatnya enak. Bersih. Ya udah saya pindah kesini. Rumah di sono mah biarin aja. Orang ngontrak kok. Disini juga ngontrak tapi lebih murah.”

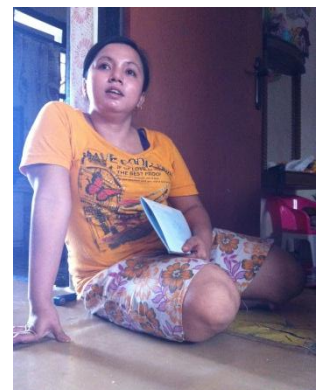
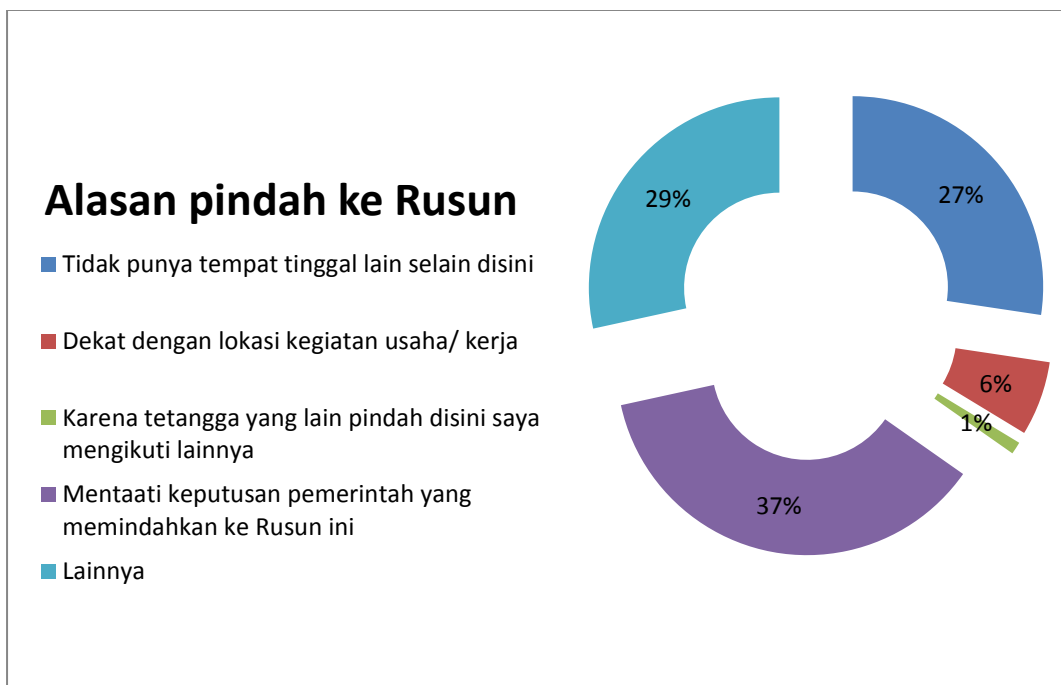


Foto 2: Pardiana, Ibu rumah tangga

Pada umumnya responden yang berada di blok C ini memilih menjawab tidak punya tempat lain selain di Rusun Marunda. Artinya, diantara para responden, banyak yang tidak memiliki bangunan rumah permanen milik sendiri. Kalau pun memiliki, mengalami penggusuran oleh pemerintah. Alasan lain adalah mentaati peraturan pemerintah untuk pindah, yaitu sebanyak 37%. Jawaban ini adalah jawaban terbanyak dari responden yang ditanya. Jawaban lain yang cukup banyak di pilih adalah alasan lain, yang tidak termasuk dalam pilihan kuesioner. Ketika melakukan wawancara mendalam, beberapa responden memilih dengan alasan pindah karena mengalami banjir. Pada lazimnya, masyarakat tidak bersedia pindah atau migrasi semata-mata karena pemerintah mengajurkan untuk pindah, karena sebagaimana John Weeks duga, banyak keterikatan sosial, ekonomi maupun budaya yang membuat masyarakat tidak bersedia serta-merta pindah, apalagi karena anjuran agar terkesan tidak dipaksakan. Namun kondisi lain mendorong masyarakat untuk pindah, yang memposisikan mereka sebagai *forced migran*, atau migran yang pindah karena terpaksa akibat kondisi banjir, sehingga tidak ada tempat tinggal lain, dan tidak ada pilihan lain selain menerima ‘anjuran’ dari pemerintah provinsi DKI untuk pindah secara permanen dengan sewa ke Rumah Susun Marunda.



Grafik 1: Alasan pindah ke Rusun.

Anjuran ini diterima dengan prasyarat, yaitu mereka memerlukan untuk melihat langsung seperti apa wujud dari fasilitas yang sudah disiapkan ini. Pemerintah Provinsi pun mengajurkan hal yang sama, namun dengan desakan bahwa hanya ada satu kesempatan, diambil sekarang atau tidak sama sekali. Hal ini mengakibatkan sebagian warga di pengungsian mengambil keputusan untuk pindah, sebagaimana Pardiana dan keluarganya ikut memutuskan. Keluarga yang tidak memutuskan ikut diduga keberatan karena lokasi Rusun yang menjauh dari sumber penghidupan serta mata pencaharian awal. Hal ini dapat dilihat dari data responden dimana hanya 6% saja yang memilih pindah karena dekat dengan lokasi kegiatan usaha atau kerja. Dibalik angka 6% ini juga perlu di gali lebih jauh. Sebagian besar dari warga yang diwancarai mengaku tidak memiliki pekerjaan, namun pemerintah memberikan bantuan berupa gerobak dagang yang dapat dimanfaatkan, namun tidak boleh dimobilisir keluar dari blok tempat tinggal masing-masing. Peluang keluarga yang memiliki mata pencaharian dengan berdagang di kawasan rusun perlu di duga masuk ke dalam angka 6% ini. Namun demikian, jumlah 6% dari responden yang menjawab memiliki pekerjaan yang dekat dengan rusun juga menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang memiliki pekerjaan yang tidak dekat dengan rusun, dan besar kemungkinan pekerjaannya masih dekat dengan tempat tinggal semula di Kelurahan Penjaringan. Tapi rupanya desakan dari pemerintah, atau pilihan karena tidak memiliki rumah lagi akibat kena gusur atau terdampak banjir, lebih menguatkan pilihan para responden pada umumnya, untuk pindah ke Rusun Marunda dan memulai kehidupan baru meskipun jauh dari tempat kepala keluarganya bekerja.



Foto 3: Rusun Marunda Blok C Tower 8, tampak tersedia lapangan sepak bola dan lahan parkir

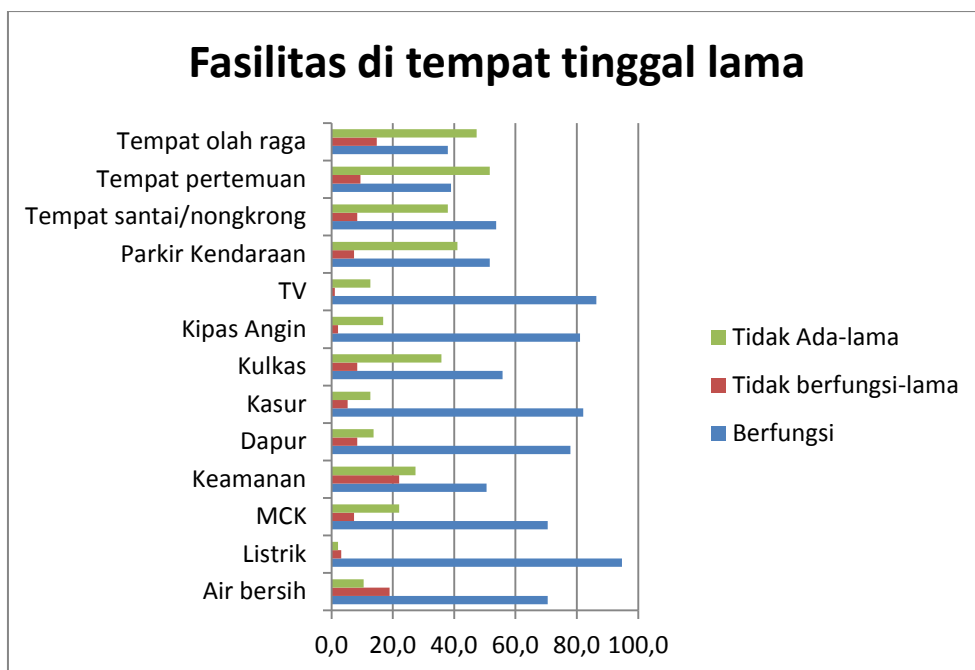


Foto 4: Lahan terbuka hijau untuk kebutuhan aktivitas tani, tanam sayur dan obat tanaman

5.3. Kesiapan Pemda DKI dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah dari Perspektif Penghuni Rusun

Pemerintah DKI Jakarta mendapatkan momentum tepat untuk bisa membujuk warga Jakarta terdampak banjir, terutama yang berasal dari wilayah Penjaringan untuk menempati Rusun Marunda. Namun pertanyaan berikutnya adalah, apakah pemerintah DKI Jakarta kemudian siap dengan konsekuensi-konsekuensinya? Pembahasan dalam sub bab ini harus diakui sangat teknis dan banyak informasi yang hanya nampak di permukaan namun sesungguhnya mengandung makna yang menarik jika dapat diteliti lebih jauh. Hal yang tidak dilakukan dalam penelitian kali ini adalah menggali makna-makna penting tersebut serta melakukan triangulasi, karena keterbatasan waktu, persiapan dan sumber daya. Namun informasi yang diperoleh baik dari responden maupun wawancara lebih mendalam dapat digunakan sebagai gambaran awal bagaimana pemerintah daerah melakukan persiapan-persiapan, dari persepsi para responden.

Sebagian besar kondisi dari rumah sebelum pindah ke Marunda memang tidak terlampaui layak. Namun setidaknya kebutuhan utama tidak dianggap masalah. Misalnya air bersih dan listrik masih tetap dapat diakses, demikian juga dengan kepemilikan TV yang mulai dianggap kebutuhan primer. Lebih dari 86% responden mengakui bahwa mereka memiliki TV yang masih berfungsi dengan baik saat tinggal di tempat tinggal lama atau sebelumnya. Lebih dari 94% mengaku mendapatkan akses listrik namun hanya 75% yang mendapatkan akses terhadap air bersih. Kebutuhan tempat pertemuan, tempat olah raga, tempat parkir kendaraan dan tempat santai atau tempat nongkrong yang nyaman sebagai bagian dari kebutuhan sosial, tidak diakses di tempat sebelumnya. Lebih dari separuh dari responden mengaku tidak mengakses fasilitas-fasilitas tersebut. Hal ini menegaskan bahwa fasilitas tersebut tidak menjadi pilihan prioritas bagi masyarakat kelas bawah, berbeda dengan televisi, listrik, air bersih dan kipas angin.



Grafik 2: Fasilitas di tempat tinggal lama.

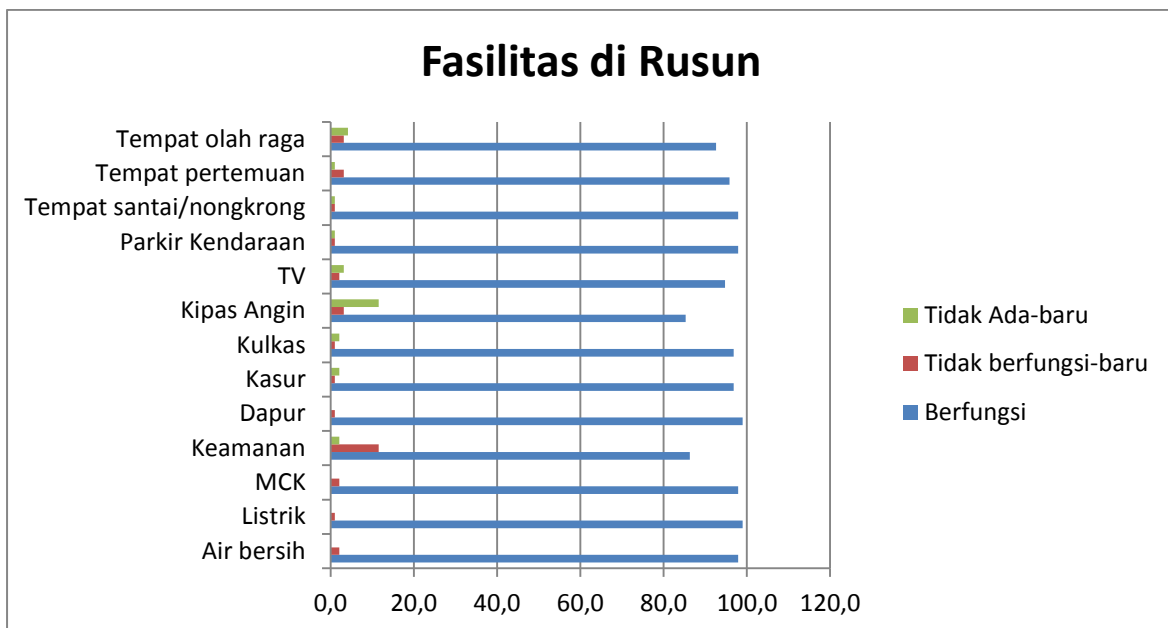
Namun demikian saat diwawancara lebih mendalam, beberapa informasi terkuak mengenai kelayakan hidup di tempat tinggal sebelumnya. Biaya sewa jauh lebih tinggi dari biaya sewa di Rusun Marunda, yaitu sekitar Rp. 350.000 hingga 500.000 per bulan. Kerap biaya tersebut belum termasuk biaya air dan listrik. Biaya sebesar itupun tidak dianggap memadai untuk menampung jumlah keluarga. Salah seorang responden dalam wawancara yang dilakukan bernama Oey Feiling, atau biasa dipanggil Aling mengaku bahwa kondisi rumah sebelumnya jauh dari layak. Dengan keluarga besarnya sejumlah 4 orang, ia menempati kamar petak yang sangat sempit, bahkan kira-kira 2 meter persegi. Dari kamar mandi (MCK) yang hanya satu yang harus dipakai oleh bersama penghuni.



Foto 5: Oey Feiling (Aling) bersama suami, Demak, dan cucu keduanya, Ana.

“Di rumah dulu, kita ngontrak kamar mandi satu. Dapur lumayan dipakai rame-rame. Ya tikus lewat-lewat kalau malam. Kalau nggak di jagain barangnya ya tikus juga masuk-masuk. Rumahnya dari saya duduk ke pintu (kira-kira 2 meter). Semua keluarga jadi satu. (biaya kontrakan) Sekitar gope dah (500 ribu) sebulan. Listrik 60 ribu, ya sekitar gope dah. Kerjaan hampir nggak nutup buat kebutuhan bulanan. ”

Aling mengaku bersyukur atas bantuan pemerintah. Ia tidak berpikir dua kali untuk pindah. Ia melihat bahwa pemerintah sudah menyiapkan fasilitas yang tidak diperoleh sebelumnya di tempat tinggal yang lama. Hampir semua fasilitas dasar disiapkan dan diberikan gratis saat kepindahan, misalnya kompor gas, televisi, kasur, piring, rak piring, kulkas bahkan kursi dan meja makan. Ia merasa kehidupan keluarganya kini lebih layak. Aling mengkonfirmasi Goetz dalam penelitian Kusumaningrum (2012) bahwa bagi masyarakat kelas bawah kepemilikan rumah atau tanah bukanlah prioritas. Bagi Aling, sama saja, apakah itu sewa atau kontrak atau milik sendiri karena keduanya menuntut tanggung jawab biaya setiap bulannya, baik listrik, air dan biaya-biaya lain. Fasilitas yang disiapkan di rusun Marunda serta fasilitas kepindahan justru disyukuri oleh Oey dan keluarganya.



Grafik 3: Fasilitas di Rusun Marunda.

Hampir seluruh responden yang diwawancara mengaku bahwa mereka mendapatkan fasilitas layak yang masih berfungsi, baik fasilitas yang dianggap primer (TV, air bersih, kasur, dapur, listrik, kulkas) maupun penunjuang (tempat olah raga, tempat pertemuan, tempat nongkrong, dan parkir kendaraan).

Aling mengaku bantuan pemerintah pun tidak berhenti di saat pindah saja. Bantuan terus diberikan bertahap, setidaknya bagi para penghuni yang pindah karena alasan banjir. Nampaknya pemerintah memberikan perhatian cukup serius atas kebutuhan hidup selama awal kepindahan para korban banjir di Rusun Marunda ini.

“Ya kita bersyukurlah sama pemerintah. Disaat kita sedang kejeput, sedang kelelep, dibantu kita. Dan itu bukannya dia ngasih ‘nih kasih duit nih buat rumah’. Nggak, dikasih semuanya. Nih, bangku dari dia, meja makan juga dari dia. Semua kulkas, rak piring, kompor gas semua dikasih gitu loh. Bahkan sebelumnya, dulu kan kita disini pagi siang sore dikasih makan di sini, disaat kita nggak dikasih makan lagi, dikasih beras, minyak. Sembako lancar. Saat bantuan sudah mau habis, datang lagi bantuan beras. Dapet lagi bantuan minyak. Dia lepas kita itu nggak langsung, terus ‘terserah lu dah’. Nggak seperti itu. Disaat sudah lama bagi yang dapat kerja ya, kerja. Bagi yang nggak kerja dikasih peluang KBN itu.” (KBN adalah perusahaan Kawasan Berikat Nusantara. -Ket.)

Bagi warga yang menempati Rusun Marunda, kebijakan pemerintah untuk memindahkan mereka dianggap cukup manusiawi. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya oleh Goetz, dalam kebijakan pemindahan warga terutama warga miskin, maka pemerintah umumnya menyiapkan fasilitas memadai agar tidak memunculkan konflik di kemudian hari. Lalu sebagaimana Gunawan juga memaparkan, pemerintah Belanda di tahun 1905-1912 juga melakukan negosiasi dan sewa tanah dengan harga tinggi agar tidak terjadi tuntutan-tuntutan di masa depan.

Hingga saat wawancara dilakukan, responden merasakan bahwa pemerintah telah memperhatikan kebutuhan mereka, dan malah kondisi saat ini lebih baik dari sebelumnya. Tidak didapat informasi apakah bisa muncul potensi tuntutan kepada pemerintah Daerah sekarang dari warga yang pindah ke Rusun Marunda. Namun nampaknya, latar bencana banjir yang cukup parah telah menjadi pendorong yang signifikan atas keberhasilan pemerintah memindahkan warga ke Rusun ini. Selain itu, pemerintah Provinsi juga memberikan perhatian serius pada pemenuhan kebutuhan dasar serta kebutuhan ekonomi di awal kepindahan warga Penjaringan.



Grafik 4: Kesan setelah tinggal di Rusun

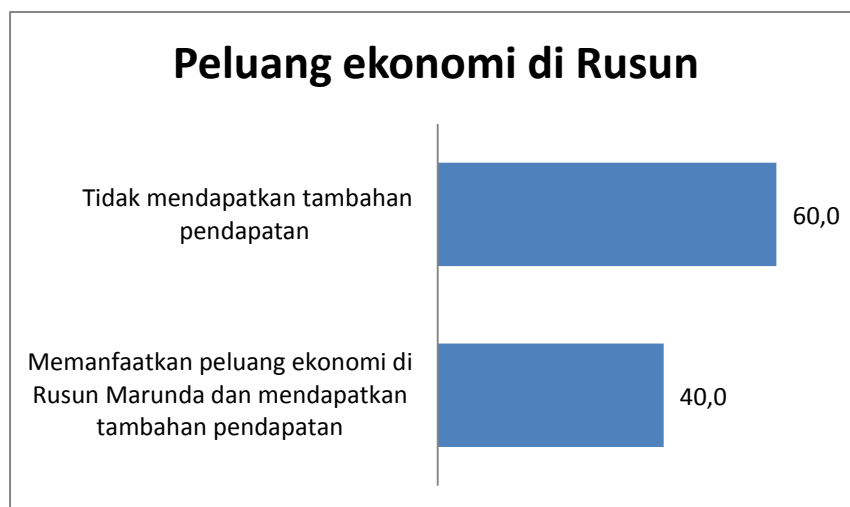


Grafik 5: Peluang ekonomi di tempat lama setelah tinggal di Rusun

Meskipun demikian, bukan berarti kepindahan ke Marunda masalah telah selesai. Warga Penjaringan yang memilih pindah nampaknya sudah meninggalkan ancaman bencana banjir yang kerap mereka hadapi selama tinggal di Penjaringan. Namun sebagaimana telah disebutkan, mereka juga telah sekian lama mendapatkan manfaat ekonomi dari jaringan sosial yang sudah terbangun. Jaringan sosial yang terbangun pun telah membentuk budaya dan kelekatan sosial tertentu yang telah melembaga.

Diakui oleh warga dalam kuesioner bahwa sebagian dari mereka kehilangan kegiatan ekonomi. Sebanyak lebih dari 28% warga hilang semua peluang ekonomi

di tempat lama. Sebagian lagi kegiatan ekonomi tetap bisa dijalankan. Beruntung bahwa pemerintah DKI cukup cermat dengan hal ini. Sebagaimana diakui oleh responden yang sempat di wawancara, mereka tetap mendapatkan peluang ekonomi meskipun tidak sama baiknya dengan tempat sebelumnya. Setidaknya pemerintah menyediakan gerobak dagangan, maupun modal usaha untuk para warga yang pindah. Sebagian lagi warga memutuskan untuk tetap melakukan kegiatan ekonomi di tempat lama, dan kerap mengorbankan biaya yang besar, serta kehilangan waktu berharga berkumpul dengan keluarganya.



Grafik 6: Peluang ekonomi di Rusun

Angka kehilangan peluang ekonomi di Rusun cukup tinggi, yaitu sebesar 60% dari responden yang mengakui tidak mendapat tambahan pendapatan di Rusun. Sementara sekitar 40% lainnya mengakui dapat memanfaatkan peluang ekonomi di Rusun Marunda sebagai tambahan pendapatan. Beberapa usaha yang muncul misalnya bagi industri rumah tangga adalah pemasangan label merk baju pada pakaian. Ibu-ibu rumah tangga, setidaknya di tower 8 mendapatkan tawaran untuk melakukan pekerjaan sampingan ini, seperti yang disampaikan oleh Andini, seorang ibu rumah tangga dengan dua anak perempuan.

“Kerjaan saya selama ini, ikut pasang label baju. Kerjanya saya lambat. Kalau orang bisa sehari saya dua hari. Cuma ngiket simpul doang. Ada yang harganya 9000. Kan satunya 3 perak. Misalnya dikasih 900. 9 ribu -15 ribu tiga hari. Sebenarnya sih nggak cukup tapi daripada iseng aja. Sekarang sih alhamdulillah sejak pulang seminggu sekali sih agak-agak cukup. Lagian kan capek, dan kepikiran karena kan jauh. Kan sering pulang malam.”

4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil temuan serta analisis, maka penelitian ini dapat menarik beberapa kesimpulan berikut.

- Warga Penjaringan mengalami migrasi terpaksa atau *forced migration*, akibat dari bencana banjir yang dialami pada tahun 2013. Para korban banjir merupakan warga ekonomi yang memprihatinkan dan dapat dikategorikan sebagai warga miskin dengan pendapatan kurang dari Rp. 3.500.000, per bulan.
- Namun demikian migrasi terpaksa karena bencana juga rupanya sejalan dengan niat pemerintah untuk menjalankan strategi pembangunan pemerintah terkait tata kota serta mengatasi permasalahan pemukiman kumuh. Perpindahan akibat *forced migration* ini menjadi salah satu peluang penyelesaian masalah tanpa konflik, penolakan atau pertentangan. Hal ini menjadi kasus yang berbeda dengan metode-metode pemindahan penduduk miskin ke areal yang dilokalisasi lainnya. Sejarah menunjukkan bahwa pemindahan tanpa kejadian bencana sebagai pendorong, kerap menimbulkan penolakan.
- Pemerintah Provinsi DKI meskipun mendapatkan 'keuntungan' dari bencana banjir yang mempermudah program tata ruang perkotaan, pengelolaan migrasi penduduk dari sub urban ke Jakarta, serta normalisasi waduk, tetap memberikan perhatian yang dianggap cukup memadai bagi kepindahan warga ke Rumah Susun Marunda.
- Dari responden yang diwawancarai, lokasi baru di Rumah Susun Marunda dianggap lebih nyaman, dengan pemenuhan kebutuhan sekunder yang dianggap memadai, yang sebelumnya tidak terakses saat sebelum pindah. Hal ini menjadi salah satu keunggulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta yang tidak hanya melakukan upaya 'sekedarnya memindahkan warga ke lokasi lain yang jauh dari visual kota modern'.
- Kebijakan pemerintah daerah dianggap sensitif terhadap permasalahan masyarakat, dan solusinya dianggap tepat sasaran, meskipun keengganan bahkan penolakan di sempat awal ada. Pemerintah menggunakan negosiasi dan memberikan kesempatan untuk mensurvei lokasi di Marunda sebelum warga mengambil keputusan. Proses dialogis ini membuat masyarakat bersedia melakukan *forced-migration* dengan suka rela dan minim konflik.

- Tidak ada perbedaan geografis mencolok antara lingkungan asal dan setelah di Rusun Marunda, meskipun sebagian warga merasakan lokasi tempat tinggal saat ini jauh dari tempat kerja mereka sebelumnya.
- Tidak muncul konflik yang terlalu tajam, karena pemenuhan kebutuhan dasar dianggap mencukupi dalam jangka waktu cukup lama sebelum warga bisa mandiri
- Dampak jangka panjang yang perlu diantisipasi: penurunan kegiatan perekonomian karena jauh dari sumber produksi, dan masih terbatasnya akses untuk memproduksi.

5. PENUTUP

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan oleh para dosen Pengampu mata kuliah Demografi Sosial, sehingga mendapatkan wawasan cukup purna mengenai dampak-dampak sosial dari permasalahan demografis yang muncul di Indonesia. Kesempatan turun lapangan menjadi salah satu keterampilan penting yang terasah selama kuliah ini berlangsung. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik dengan rekan-rekan satu kelas dalam mata kuliah Demografi Sosial, baik rekan-rekan dari S1, S2 maupun S3.

Selanjutnya, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih atas keterbukaan warga Rumah Susun Marunda dalam memberikan informasi yang penting bagi penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kepentingan akademis dan kebijakan di masa datang.



Foto 6: Penelitian di Rusun Marunda,
31 Mei 2014

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Artikel, Dokumen:

John R Weeks, (2008), Population – An Introduction to Concepts and issues, Thomas Wadsworth

Restu Gunawan, (2011), Di Kala Air Tidak lagi Menjadi Sahabat: Banjir di Jakarta 1930-1970, dalam Indonesia Across Orders: Arus Bawah Sejarah Bangsa (1930-1960), e. Taufik Abdullah, LIPI Press 2011

Aninda Ratih Kusumaningrum, (2012), thesis Analisis Kebijakan Rumah Susun Sewa dengan Studi Kasus Rumah Susun Marunda, UI 2012

Konsorsium Fakultas Ilmu Sosial, Depdikbud dan BKKBN, 1985. *Studi Kependudukan*

Bo Malmberg, (2007) Demography and Social Development, (Chapter 1), International Journal of Social Welfare, pp 821-834

Undang-undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2012-2019

Website:

<http://news.detik.com/read/2013/01/18/133633/2146260/10/bnpb-8-atau-41-km-persegi-daerah-jakarta-tergenang-banjir-kemarin?nd771104bcj> diunduh tanggal 15 Juni 2014

<http://Antaraneews.com> Minggu, 20 Januari 2013

¹<http://tom-kuu.blogspot.com/2013/01/di-balik-kisah-banjir-pluit-januari-2013.html>, diunduh tanggal 14 Juni 2014

<http://www.jakarta.go.id/v2/news/2013/01/467-kk-asal-muara-baru-huni-rusun-marunda#.U5wM7pSSzko>

<http://jakarta.okezone.com/read/2013/01/20/500/748992/ini-penyebab-kawasan-pluit-banjir/large>

7. LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

LOKASI WAWANCARA: RUMAH SUSUN MARUNDA, BLOK C, TOWER 8

PEWAWANCARA DAN PENCATAT TRANSKRIP: Irina Rafliana, Sosiologi UI, Program Magister 2013

TANGGAL WAWANCARA: 31 MEI 2014

Informan 1: Waktu wawancara: 13.12 wib

Andini Septini, Blok 8 Lt. 2 No. 13

Perempuan, Lahir Jakarta tanggal 12 Maret 1990

Waktu kecil tinggal di Muara Baru. Setelah menikah ikut dengan suami di Jembatan Besi sampai 3 tahun. Terus denger kalau di Taman Burung itu tanahnya murah, terus beli disana. Waktu itu cuma dua juta tanahnya doang ya. 6 x 6 meter. Terus dibangun, dapat baru dibangun setahun, dibongkar kena gusuran. Terus pindah ke sini. Awalnya kena banjir dulu. Setelah banjir ke penampungan baru kemari, terus nggak boleh pulang lagi. Pas suami ke sana lagi udah digusur. Rumahnya baru dibangun separo, soalnya biayanya belum ada. Saya baru bangun 3x3m. Tempat sekarang sih lebih baik. Kalau di tempat sana masih kayak hutan gitu jadi masih banyak ular. Jauh lebih baik, selain bersih. Pemukimannya untuk anak-anak bagus, sekolah dekat. Kalau disana jauh. Tapi disini Bapaknya kerjanya lebih jauh. Ongkos kerja lebih berat. Kalau di Muara Baru seminggu bisa sepuluh ribu. Januari kemarin sudah satu tahun tinggal disini. Dari penampungan langsung kemari, saya nggak pernah lihat rumah. Suami aja yang bolak balik lihat rumah, terus katanya dibongkar. Awal katanya mau dikasih ganti rugi, ternyata nggak. Katanya digusur dapat Rusun di Cakung. Saya nggak mau kan, sudah dapat disini. Jadi yang di daerah Cakung itu udah diambil orang (lain). Orang itu bayar sama suami saya cuma bayar 2 juta padahal udah keluar lebih dari 40 juta buat bangunan. Bangunannya dari tembok semua. Jadi baru nempatin satu tahun, Cuma dapet ganti 2 juta. Awalnya sih mau ganti 6, 8 juta. Tapi jadinya cuma dapet 2 juta.

Sewa disini, ya selamanya lah. kalau nggak disini kemana lagi. Tempat diluar sana yang kayak begini kan mahal. Disini lebih murah. 150 ribu sebulan, listrik air bayar sendiri. Tapi sampai sekarang air belum bayar baru bayar abondemen aja, karena lantai 3 sama 4 belum ada meterannya jadinya belum bayar, nanti kalau sudah dipasang meterannya, baru di nol-in lagi terus pada bayar pakai token. Listrik kan tergantung uang kita, kalau uang habis, ya nggak nikmati listrik. Di rumah lama, air bersih ada, tapi nggak segampang di sini.

Tidak kerja, dan tidak pernah kerja. Asli orang sunda, islam. Sama dengan suami. Dengan suami ketemu kelas 2 SMA, suami kelas 3, setelah lulus langsung menikah. Awal pindah kesini, waktu dipenampungan, pak Ahok datang. Terus nanya siapa yang mau ikut ke Rusun. Awalnya sih saya

nggak mau, tapi suami yang ninjau ke sini. Saya bilang sih, biar aja lah kalau rumah di bongkar kita balik aja ke rumah orang tua. Tapi kata suami tahu sendiri kan di Jembatan Besi ngontrak 300 ribu aja sekamar, takutnya anak pengen main atau pengen apa. Suami yang pengen disini banget. Saya nggak mau. Tapi pas sudah kemari, lama-lama ya betah juga. Malah dia yang mulai kecapekan karena jauh banget dari tempat kerjanya. Sekarang ini nyari solusinya, keuangan juga agak goyang jadi pulanginya seminggu sekali aja. Dia dengan emaknya tinggal, pulang kesini seminggu sekali, jadi ngirit bensin, tenaga. Kerjaan saya selama ini, ikut pasang label baju. Kerjanya saya lambat. Kalau orang bisa sehari saya dua hari. Cuma ngiket simpul doang. Ada yang harganya 9000. Kan satunya 3 perak. Misalnya dikasih 900. 9 ribu -15 ribu tiga hari. Sebenarnya sih nggak cukup tapi daripada iseng aja. Sekarang sih alhamdulillah sejak pulang seminggu sekali sih agak-agak cukup. Lagian kan capek, dan kepikiran karena kan jauh. Kan sering pulang malam.

Dengan tetangga kenal sih, tapi cuma 'say Hi' aja, kecuali tetangga sebelah akrab banget. Tetangga disini lebih enak. Kalau disana panas banget kalau siang, matahari langsung menghadap rumah. Malas keluar rumah, jadi tutup pintu melulu, anak-anak juga maunya di dalam. Mana debu lagi, jadi tutupan melulu, jadi lebih enak di sini.

Pencurian disini sering. Ada yang manjat dari jendela dapur, kan ada pijakannya. Malingnya sering mantau rumah yang jarang ditempati. Pasti yang ilang itu TV yang gampang di bawa.

Bayar sewa itu harus antara tanggal 1 sampai tanggal 20, lewat itu di denda, terus tembok depan nggak boleh di cat. Kecuali bagian dalam rumah boleh di cat. Dulu ada iuran RT tapi sekarang sudah berhenti.

Informan 2: Waktu wawancara: 13.40 wib

Pardiana Lestari, Blok 8 Lt. 3 No. 13

Perempuan, Lahir Jakarta, tanggal 17 September 1988

Saya cari tambahan uang bulanan, kalau lagi kurang, ya saya pinjem aja (hahaha...). Kan saya mah nggak gaji bulanan. Saya dapat harian dari suami. Makanya kalau bisa saya ngumpulin, dari uang harian dari sisa belanja. Sehari dari suami dapet 100 ribu. Pemasukan lain sampingan kalau ada bongkaran. Kalau nggak ada ya udah, ngandelin harga. 100 ribu per hari buat masak, sekolah, jajanan anak. Kalau bulanan kayaknya bagaimana gitu mbak, berat. Suami pakai motor. Sewa mobil bakseminggu 600 ribu. Kalau sewa mobil bak kalo ada orderan bongkaran (bangunan) aja. Ini lagi nggak ada bongkaran jadi nggak sewa. Bawa anak buah juga, kadang-kadang 10.

Pengennya sih sekolah anak-anak tinggi, kayak keluarga Bapaknya kan keluarganya gitu tinggi mbak pada sekolah. Pengennya sekolahnya tinggi biar berguna, biar Bapaknya bego yang penting anak kan Mbak (hahaha...). Kalau nggak dapet sehari 100 ribu, terpaksa pinjam dulu sama orang. Kalau nggak kerja sehari kan nggak dapet duit tuh, ya udah pinjem aja sama orang. Nggak mangkel sama suami kalau nggak ada duit kan orang ada sakitnya. Yang bikin berantem di rumah, ya paling tentang anak aja. Saya kan suka ngomelin anak, jadi berantem melulu. Saya kan pusing ya. Sama Bapaknya nggak boleh. Mau jajan boleh aja. Kata suami saya, uang kerja kan buat anak, jangan dilarang-larang.

Rumah tangga sudah 10 tahun. Jarak umur dengan Bapak. Dia temannya kakak saya. Kenal tiga bulan doang mbak, saya masih 16 nikah tuh. Alhamdulillahnya punya anak 3 nggak pernah mukul, paling bentak. Sukanya bercanda, sayang sama anak. Kalau kerja kalau nggak sakit nggak ada perainya mbak, bener-bener belain buat anaknya mbak. Biar bisa makan, punya.

Tempat disini lebih enak. Kalau di sono mah kena banjir parah mbak. Sampai plafon rumah. Terus ngungsi di Pemeta. Terus pak Ahok dateng, nawarin mau Rusun nggak di Marunda? Kan banyak yang nggak mau. Saya mah nggak kompromi sama keluarga, sama suami aja, ya udah yang enak aja. Pas dilihat tempatnya enak. Bersih. Ya udah saya pindah kesini. Rumah di sono mah biarin aja. Orang ngontrak kok. Disini juga ngontrak tapi lebih murah.

Saya orang kuningan tapi lahir di Jakarta, keluarga semua ada di Jakarta deket, ngumpul sih.

Kalau dapat sampingan banyak, saya sering sih nabung, juga kumpulin duit buat beli emas. Abis kalau pinjam-pinjam terus kan susah. Kemarin usahanya rugi, nombok. Suami ditipu sama temennya sendiri. Memang lagi apes. Mustinya sih kerjanya nggak rugi, tapi ditipu sama temennya.

Saya belum lulus SMA nikah, kelas 2 SMA. Hahaha..Tau dah, saya nggak inget pelajarannya. Udah lama juga ninggalin sekolah. Saya kerja di Mangga Dua, di toko wig. Sebelum nikah mah sering kerja dimana-mana bantu orang tua. Setelah nikah berhenti kerja, nggak boleh sih sama suami.

Informan 3: Waktu wawancara: 14.45 wib

Oey Feiling Lt. 4 No. 5

Perempuan, Lahir tanggal 27 September 1967

(wawancara dilakukan di ruang keluarga, anggota keluarga lain ikut dalam bincang-bincang; yaitu Demak, laki-laki, Kepala Keluarga, lahir di Brebes Jawa Tengah tanggal 11 Mei 1985. Demak adalah Suami dari Ibu Oey Feiling. Lalu anak perempuan Ibu Oey Feiling, yaitu Christin, lahir di Tambora Jakarta, tanggal 25 Januari 1997)

Bapak (kandung) Christin masih ada, asli Chinese juga.

KBN kayak pergudangan PT gitu. Ada yang sebagian kerja disini, ada juga yang kerja di Muara Baru. Tempat wisata di sini paling ke rumah Pitung, atau disitu tuh (pantai di belakang Rusun).

Saya kerjanya di bagian lapangan, bagian pembelian. Kadang masuk ke catering. Campur-campur lah. Kalau sedang kosong, semua kita bantu-bantu packing. Sudah lama nggak kerja, 3 bulan nggak kerja-kerja. Sekarang ini lahiran, stop lagi sekarang. Sebulan lagi kali setelah ini orok gedean. (Christin baru melahirkan bayi perempuan 5 hari lalu, dan masih sangat tergantung bantuan ibunya untuk merawat bayi).

Di rumah dulu, kita ngontrak, kamar mandi satu. Dapur lumayan dipakai rame-rame. Ya tikus lewat-lewat kalau malam. Kalau nggak di jagain barangnya ya tikus juga masuk-masuk. Rumahnya dari saya duduk ke pintu (kira-kira 2 meter). Semua keluarga jadi satu. Sudah menikah dengan Demak 4 tahun. Nikah siri.

Dulu kontrakan rumah banjir sampai satu atap. Barang-barang tidak ada yang diambil. Kalaupun diambil sudah jijik banget deh, nyampur sama bangkai binatang, bangkai anjing. Surutnya seminggu. Semua kasur semua dibuang. Semua blok disini pindah karena banjir. Waktu mau pindah, saya yang minta. Sekarang mau pindah kemana lagi? Mau cari kontrakan? Emang punya duit? Disana kan mahal. Sekitar gope dah (500 ribu) sebulan. Listrik 60 ribu, ya sekitar gope dah. Kerjaan hampir nggak nutup buat kebutuhan bulanan. Kerjaan ada toko 3, saya dipusat gudang, kadang disuruh belanja barang buat catering. Terus urus catering. Kalau nggak bantu delivery. Nama perusahaannya Klub Sehat. Kita disana terima konsultasi juga, tapi obat-obatannya juga jus-jusan. Buat detoks, sakit kanker. Kalau ikutan saran, bisa sembuh.

Pindah ke sini pendapatan nggak berkurang sih. Namanya juga usaha dagang. Waktu awal pindah anjlok, bener-bener sepi dah. Bener-bener sepi minta ampun. Dagang sekarang kan gede modalnya dari untungnya. Udah gitu beli bakmi kan jauh ke daerah Cengkareng. Karena bakmi kota sama bakmi sini kan beda, dibilangnya bakmi chinese. Dulu jual pangsit dan bakso. Dulu coba tapi kualitas nggak bagus. Jadi bakmi pakai ayam. Tidak pakai bakso karena nggak nutupin. Karena gede di modal. Kalau laku 5 kg bisa sisihkan untung sedikit. Kecap kita punya juga beda, 12 ribu, kalau yang lain 5 ribu. Kita kan jaga rasa dan kualitas. Kalau mereka punya daging ayam suka dicampur kan sama daging bohong, kalau kita nggak. Buat dagang beli ayam 2 ekor. Ya alhamdulillah lah, yang penting cukup buat sehari-hari.

Peluang ekonomi disini pas-pasan aja. Menantu saya juga di blok 3 dagang sendiri, dagang kopi, dagang indomie.

Kita jarang bergaul dengan tetangga. Tapi akur, saling menyapa. Karena sudah sibuk masing-masing. Nyaman sih, tapi ya nggak nyaman kalau naik tangga 4 lantai. Disini serba salah ya, mau

pakai lift, nanti sebentar aja cepat rusak dimainin anak-anak. Buat orangtua juga repot. Yang paling enak itu kan kalau listrik, air, WC nyaman iya kan? Kalau itu udah nyaman, yang lain nomor sekian. Kan itu yang ditanya orang kan? Yang bikin nggak nyaman ya berisik sama turun naik tangga. Cekcok di dalam keluarga nggak pernah.

Tetangga masih banyak yang kerjanya di Muara Baru. Ada kapal disiapin khusus untuk yang kerja. Jadi pagi dari sini, sore dari sana, satu kapal 24 orang. Setengah jam, cepet sih nyampe. Saya pernah pakai kapal, tapi lama juga. Karena ngetem-ngetem juga. Kalau naik ojek kan satu jam, bayar sekitar gocap (lima puluh ribu rupiah).

Rencana maunya seterusnya. Tapi nggak boleh jadi hak milik. Ya intinya dimanapun harus bayarlah. Dikasih rumah aja bersyukur banget. Kita dikasih gratis misalnya sama orang, tetap aja bayar listrik. Sama aja itungannya sama disini. Disini pakai nama sendiri. Kalau ditempat lain, nama orang lain. Ya kita bersyukurlah sama pemerintah. Disaat kita sedang kejeput, sedang kelelep, dibantu kita. Dan itu bukannya dia ngasih 'nih kasih duit nih buat rumah'. Nggak, dikasih semuanya. Nih, bangku dari dia, meja makan juga dari dia. Semua kulkas, rak piring, kompor gas semua dikasih gitu loh. Bahkan sebelumnya, dulu kan kita disini pagi siang sore dikasih makan di sini, disaat kita nggak dikasih makan lagi, dikasih beras, minyak. Sembako lancar. Saat bantuan sudah mau habis, datang lagi bantuan beras. Dapet lagi bantuan minyak. Dia lepas kita itu nggak langsung, terus 'terserah lu dah'. Nggak seperti itu. Disaat sudah lama bagi yang dapat kerja ya, kerja. Bagi yang nggak kerja dikasih peluang KBN itu.

(Tanya: KBN itu famili Pak Ahok bukan?) Demak menjawab, Pak Jokowi yang carikan.

Dia kasih kita bantuan, tapi bukan cuma bantuan tapi pancingan. Dia kasih kita pancingan supaya terus berusaha mendapatkan makanan. Jualan disini sih paling laku air isi ulang, itu keperluan orang setiap hari. Gerobak dikasih pemerintah. Tapi kita bikin sendiri. Kalau kita bikin sendiri mau kabur dibawa kemana bisa. Kalau dikasih pemerintah, sudah ditetapkan di blok 7, nggak bisa jualan di blok 8. Nggak bisa dipindah ke blok 3. Kalau punya sendiri kan enak. Kita mau keluar mana yang rame bisa. Untuk dagang pertama dengernya dikasih modal. Dulu di kapuk pernah dagang mi Ayam. Terus mi goreng, capcay. Kalau disini coba dulu maju usaha ini satu. Kalau maju baru buka usaha yang lain.

Informan 4: Waktu wawancara: 16.00 wib

Daeng

Laki-laki.

Kita asli dari Pluit Muara Baru, korban banjir. Kita orang pertama korban banjir. Saya asli dari Pluit Muara Baru, korban banjir tahun kemarin, 2013 bulan berapa ya, bulan 2. Kita kloter pertama, pertama mengungsi ke Pantai Mutiara, ada ribuan pengungsi saya yang pegang, karena saya kepala rombongan saat itu. Terus Pantai Mutiara kira-kira mau banjir lagi, kita dipindahkan ke Permai. Di Pantai Mutiara 4 hari. Jadi terus dipindahkan jam 10 malam ke sekolah Permai Muara Karang. Dipindahkan lagi ke yang terakhir itu di Pemeta. Jadi saya disitu 4 malam juga. Kita diajuin lah, dikasih saran. Survei dulu kesini. Dulu nggak kayak begini. Rawa ini. Ini sudah dibangun tapi masih rawa tidak bersih kayak gini. Baru ini kami di urug. Saya datang kesini. Waktu disana banyak nyamuk, disini lebih banyak lagi nyamuk disini kalau kita pikir-pikir waktu pertama. Setelah kita

udah disini, mungkin dukungan-dukungan banyak benar-benar diperbaiki. Diurug semua. Sampai sekarang di rumah tidak ada keramik, tapi kita bersyukurlah. Pindah pertama kali saya ini sama 37 KK, gelombang pertama, blok 8 ini pertama ini, dibawah oleh Ahok. Blok 8 ini pertama kali pindah dari Pluit, tapi karena korban banjir. Memang ada yang pertama pindah di Blok 1 di depan, tapi bukan korban banjir. Blok 8, blok 7, blok 9, blok 11, blok 10, blok 2, blok 3 sebagian. Blok 5 sebagian umum, sebagian korban banjir. Berikut juga blok 6, memang korban banjir. Orang lain baru pada mau. Kalau yang pertama, masih mikir-mikir. Belakang ini baru menyesal, sampai ada yang mau beli tapi disini tidak diperjual belikan. Karena memang kita aturannya begitu. Walaupun dia tidak betah, dia mau pulang kampung, ya bagaimana sih, kalau ada yang mau masuk dan mau keluar, paling minta ongkos. Ya berapa sih kalau cuma ongkos pulang, ya ongkos capek angkat kasur angkat apa segala naik, cuma 500 ribu lah ongkos pulang. Bukan perjual belian itu, ya cuma ongkos pulang lah. Itu bagi yang tidak betah. Tapi tetap pulang kampung dia menyesal, lalu ia mau beli malah. Tapi kan sudah tahu aturan sebelumnya. Sekarang kan kalau bukan korban banjir jadi pendaftar umum kan, jadi ya daftar lah ke pengelola. Jadi kalau sejarahnya itu. Pertama 37 KK, disusul 29 KK. Saya begitu diajak kesini survei, langsung ingin pindah hari itu juga, karena rumah sudah tidak ada. Bukan sudah tidak ada, masih tenggelam waktu itu. Masuk rumah tidak bisa, air sampai ke asbes. Saya lumayan juga kerjanya di Pantai Mutiara, jadi sekuriti. Sampai sekarang masih sekuriti, Alhamdulillah saya dipindah sama Ahok jadi sekuriti tanah kosong di belakang ini. Saya waktu itu bilang, Pak Ahok, saya ingin pindah di rumah yang enak, ninggalin keluarga di rumah baru untuk masa depan anak saya. Ada satu tahun bulak balik di Muara Baru karena masih kerja di sana. Dulu ditawarkan sama Pak Wakil Gubernur, Pak Daeng mau kerja dimana? Saya bilang, jangan pak saya masih disenangi bos saya, dan bisa bolak balik dengan motor. Sekarang kan sudah tua, capek juga. Alhamdulillah sekarang diterima di belakang ini. Hari itu juga saya dipindahin kesini, ke KBN. Waktu saya mau ketemu Pak Ahok (di kantornya) langsung saya bilang sama pengawalnya, langsung saya diterima dan dikawal bertemu. Jadi memang sebelum kesana, Pak Ahok sudah sms, apa keluhan Daeng, kesini saja. Karena orang kecil kayak gini, masa ke kantor gubernur, bagaimana kalau ketemu Pak di Pantai Mutiara saja. Saya ngomong, Pak Ahok setelah jadi gubernur tinggal di Pantai Mutiara. Setelah banjir aja saya kenal, biarpun dulu petugas keamanan di Pantai Mutiara.

Setiap datang ke pengungsian, saya dicari, jadi saya pertama dicari. Saya kenal semua keluarga disini karena bawa semua kepala keluarga. Satu blok ini 100 KK. Satu lantai 25 KK, karena 5 lantai jadi 100 KK. Pengungsi dari Pluit ini saya kenal semua, campur-campur aslinya bukan hanya orang Makassar saja. Suasana sekarang lebih enak, anak-anak juga lebih enak, terjaga. Kalau disana 24 jam anak-anak bisa keliling-keliling, tidak tenang. Kita juga ada tetangga pulang dari lelang mana-mana sampai jam 3 pagi. Untuk keamanan di sini masalah ada, pernah ada kehilangan motor di Puskesmas, punya Ibu Bidan. Tapi sekuriti dan wilayah ini juga. Wilayah ini campur dengan warga sini. Warga luar rusun bisa masuk, petugas tidak mungkin tutup pintu 100% tidak enak sama warga juga, kecuali peraturannya bisa ditegakkan pemerintah untuk mengontrol tamu.